

## Dependensi Positif Antara Indonesia-Amerika Serikat Dalam Penguatan Ketahanan Militer Pasca Embargo Militer Tahun 2005

*Andiana Hikmawati*

Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Indonesia

email: [andiana.hikmawati@ui.ac.id](mailto:andiana.hikmawati@ui.ac.id)

Dikirim; 28-02-2023; Direvisi; 14-04-2023; Diterima; 27-04-2023

### ABSTRACT

*Military resilience was an integral part of national security which reflected the holistic synergy of the 7 K paradigm, that was tenacity, toughness, capability, strength, self-confidence, authority, and state sovereignty. An understanding of this paradigm was the aim of being able to deal with various possibilities that endangered sovereignty, territorial integrity, and the safety of the nation and state. This study aimed to understand what indicators could explain and support mutually beneficial cooperation between countries from a national security approach categorized as a positive dependency using modern dependency theory analysis.*

*The method used in this study was a qualitative method with an explanatory approach. The data collection method used was a triangulation technique from literature and document studies, then analysis was carried out to find the validity of the data.*

*The results of the study concluded that in empowering Indonesia's military resilience, one of the elements of the defense system reflected a positive dependency between the two indicators for the creation of a dynamic relationship between Indonesia and United States and an increase in productivity efficiency based on an analysis of historical structural variables, internal and external factors, as well as cause-effect relationships between the receiving country and the supplying military defense equipment country.*

**Keywords:** *Military Resilience; Modern Dependencies; Positive Dependencies*

### ABSTRAK

Ketahanan militer merupakan bagian integral dari ketahanan nasional yang mencerminkan sinergi holistik dari paradigma 7 K yakni keuletan, ketangguhan, kemampuan, kekuatan, kepercayaan diri, kewibawaan, dan kedaulatan negara. Pemahaman mengenai paradigma ini menjadi tujuan untuk dapat menghadapi berbagai kemungkinan yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami indikator-indikator apa saja yang dapat menjelaskan dan mendukung kerjasama saling menguntungkan antar negara dari pendekatan keamanan nasional dikategorikan sebagai dependensi positif menggunakan analisis teori dependensi modern.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pola pendekatan eksplanasi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik triangulasi dari studi kepustakaan dan dokumen, kemudian dilakukan analisis untuk menemukan validitas dari data-data tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pemberdayaan ketahanan militer Indonesia yang salah satu elemennya alutsista mencerminkan dependensi positif antar dua indikator demi terciptanya hubungan dinamis antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan peningkatan efisiensi produktivitas didasarkan kepada analisis variabel historis struktural, faktor internal dan eksternal, serta hubungan sebab-akibat antara negara penerima dengan negara penyuplai alutsista militer.

**Kata Kunci:** *Ketahanan Militer; Dependensi Modern; Ketergantungan positif.*

## PENGANTAR

Negara bangsa merupakan aktor utama dalam sistem internasional yang terbuka dan saling mempengaruhi. Menurut pandangan kaum realis, pencapaian utama dalam kepentingan nasional suatu negara bangsa adalah dengan menjaga eksistensi dan mempertahankan keamanan dari ancaman negara lain dengan mengandalkan pada instrumen militer (Weldes, 1996). Instrumen militer adalah salah satu elemen penting dalam ketahanan nasional dimana ketahanan nasional mencerminkan sinergi holistik paradigma 7 K yakni keuletan, ketangguhan, kemampuan, kekuatan, kepercayaan diri, kewibawaan, dan kedaulatan negara. Faktor-faktor dalam paradigma 7 K meliputi geografi, sumber kekayaan alam, demografi atau kependudukan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan nasional.

Seiring dengan berjalannya waktu, ketahanan nasional suatu negara telah mengalami perkembangan yang pesat baik teknologi maupun konsep dari makna ketahanan itu sendiri. Ketahanan militer merupakan segala upaya bagi negara dalam mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari adanya gangguan ancaman yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara (Bakrie, 2007). Hal ini menyiratkan pemahaman bahwa ketahanan militer merupakan salah satu unsur pokok atau penting dalam menunjang upaya suatu negara dalam mempertahankan eksistensinya.

Realita akan konsep ketahanan militer inilah yang kemudian mendorong banyak negara berupaya untuk meningkatkan dan memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) mereka. Salah satunya juga dilakukan oleh Indonesia sebagai negara

yang memiliki wilayah yang luas, memerlukan adaptasi dengan lingkungan yang serba berubah yang disebabkan oleh adanya tantangan terhadap ketahanan nasional tersebut. Aspek ketahanan militer yang dimiliki oleh Indonesia, khususnya terkait konteks alutsista yang dimiliki masih belum optimal. Tantangan mengenai pengoptimalan alutsista ini merupakan salah satu agenda utama dalam pembinaan ketahanan militer Indonesia.

Agenda tersebut berkaitan dengan pilihan prioritas penyempurnaan alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang akan menentukan kekuatan dan kemampuan dari postur pertahanan Indonesia (Muhaimin, 2008). Menilik dari sejarahnya terkait ketahanan militer Indonesia, relatif baik pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto karena hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat terjalin baik. Faktor yang mempengaruhinya antara lain karena adanya kepentingan yang sama pada aspek ekonomi, politik, sikap/persepsi terhadap ancaman komunisme di kawasan Asia Tenggara. Sikap/persepsi terhadap ancaman komunisme inilah yang menguatkan kerjasama kedua negara.

Kerjasama militer antara Indonesia dan Amerika Serikat diwujudkan dalam beberapa program yaitu *International Military Education Training (IMET)*, *Foreign Military Sales (FMS)*, dan *Foreign Military Financing (FMF)*. Sejak masa Orde Baru, bantuan Amerika Serikat menjadi sumber utama pengadaan alutsista pertahanan Indonesia, antara lain pesawat tempur, pesawat angkut, radar, peralatan komunikasi, dan lain-lain (Kementrian Pertahanan RI, 2015). Namun pada dekade 1990-an, pengadaan alutsista pertahanan Indonesia di embargo oleh Amerika

Serikat yang disebabkan oleh perubahan hubungan politik kedua negara.

Perubahan politik itu berawal dari insiden Santa Cruz di Timor yang menyita perhatian dunia internasional atas tuduhan pelanggaran HAM berat menyebabkan posisi kritis politik pertahanan Indonesia. Faktor yang mendorong kebijakan pertahanan Indonesia berupaya untuk menghentikan aksi demo yang menuntut kemerdekaan Timor Timur. Upaya unsur militer Indonesia untuk menanggulangi aksi demo yang mengarah pada anarkisme dan mengancam keselamatan prajurit Indonesia mendorong satuan militer untuk melakukan upaya bela diri berupa aksi penembakan yang mengakibatkan banyak korban tewas dan beberapa orang lainnya hilang (Alkostar, 2004). Insiden ini ternyata menjadi isu serius bagi Amerika Serikat mengingat negara ini merupakan pengekspor alutsista militer bagi Indonesia. Amerika Serikat kemudian memberikan sanksi embargo ekonomi dan militer antara lain pelarangan lalu lintas barang baik ekspor maupun impor, terutama pengadaan alutsista tercantum dalam Pasal 6 *Arms Trade Treaty* mengenai larangan perdagangan senjata terhadap suatu negara yang dinilai melakukan pelanggaran (Marwan dan Jimmy, 2009).

Namun, embargo militer yang telah melemahkan ketahanan militer Indonesia tidak sepenuhnya menyebabkan penurunan ketahanan militer Indonesia secara fatal, antara lain karena Indonesia tidak sepenuhnya lepas dari bantuan Amerika Serikat dan tetap mampu meningkatkan kemandirian alutsista dalam negeri untuk menunjang ketahanan militer. Realitasnya berdasarkan pada *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) yang dijabarkan dalam publikasi Siemon T. Wezeman bahwa

sepanjang tahun 2006 hingga tahun 2021, sebanyak 1.182 alutsista Indonesia disuplai oleh Amerika Serikat (Wezeman, 2019). Hal ini mengisyaratkan bahwa telah terjadi situasi dependensi positif terkait penguatan ketahanan militer Indonesia. Embargo Amerika Serikat tidak menyurutkan Indonesia untuk tetap memosisikan Amerika Serikat sebagai penyuplai alutsista ke Indonesia disamping Indonesia memiliki opsi untuk melakukan kemandirian dalam mendukung ketahanan militernya.

Ketahanan militer suatu negara jika diukur dari penguatan alutsista memerlukan pengkajian komprehensif dan kajian ini tidak hanya terkait keamanan negara, tetapi turut pula mempengaruhi kebijakan dan hubungan antar satu negara dengan negara lainnya. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas tersebar dalam pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil, berpenduduk plural dan heterogen sangat rawan terhadap ancaman militer dan perpecahan antar suku, antar pemeluk agama, dan golongan (SARA).

Hal ini mendorong Indonesia mengembangkan ketahanan militer melalui pengadaan alutsista melalui produksi dalam atau pengadaan dari luar negeri melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Kerjasama ini merupakan realisasi dari dependensi positif antar dua indikator demi terciptanya hubungan dinamis antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan peningkatan efisiensi produktivitas didasarkan kepada analisis variabel historis struktural, faktor internal dan eksternal, serta hubungan sebab-akibat antara negara penerima dengan negara penyuplai alutsista militer dalam rangka meningkatkan pemenuhan alutsista militernya dari negara lain.

Telah ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai kajian ketahanan

militer Indonesia yang dapat digunakan sebagai referensi pembandingan. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori, yakni Ekonomi-Pertahanan, Politik-Domestik, dan Ketergantungan Militer. Pada kategori ekonomi-pertahanan, melalui sudut pandang kerjasama pertahanan secara umum menggambarkan bahwa adanya peningkatan pengadaan ataupun modernisasi sistem pertahanan di suatu negara dapat diwujudkan melalui upaya kerjasama bilateral.

Penelitian ini juga menjelaskan bahwa kerjasama bilateral akan memberikan dampak bagi sistem pertahanan kedua negara, serta turut pula menjadikan kerjasama sebagai strategi bagi negara dalam meningkatkan ketahanan alutsista mereka. Sementara itu dari kategori politik-domestik, menjelaskan bahwa aspek politik-domestik dapat mempengaruhi kebijakan pertahanan dan keamanan suatu negara. Kemudian, dari kategori ketergantungan militer, menjelaskan bahwa opsi kemandirian dan dependensi positif dengan pihak lain tetap relevan untuk meningkatkan ketahanan militer.

Berdasarkan temuan pada penelitian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi ketergantungan militer (belum mandirinya negara) menjadi aspek mendasar dalam proses pengambilan keputusan pemenuhan ketahanan militer. Penelitian terdahulu oleh peneliti lain menunjukkan bahwa kesenjangan masih eksis karena masih kurangnya kajian ketahanan militer yang menyebabkan ketergantungan serta belum dilakukannya penelitian yang secara spesifik membahas mengenai penguatan alutsista dari sudut pandang ketergantungan positif yang mempengaruhi hubungan dengan negara lainnya. Mayoritas kategori ketergantungan militer hanya menganalisis dari satu sisi semata, yakni secara negatif.

Kajian mengenai ketahanan militer, khususnya ketahanan militer Indonesia menjadi penting untuk dilakukan mengingat penguatan alutsista merupakan upaya gencar yang sedang dilakukan Indonesia berkaitan dengan isu ancaman keamanan. Oleh karena itulah, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami indikator apa saja yang dapat menjelaskan dan mendukung pilihan ketergantungan dengan menggunakan sudut pandang ketergantungan positif akan dapat secara spesifik menjelaskan alasan serta implikasinya terhadap keputusan Indonesia melakukan kerjasama saling menguntungkan dengan Amerika Serikat dalam rangka pemenuhan pembinaan ketahanan militer.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pola analisis data menggunakan pola eksplanasi. Metode penelitian kualitatif menjadi metode yang berlandaskan kepada filsafat *post positivis* yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti suatu objek yang bersifat alamiah (Sugiyono, 2013). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan dan dokumen, dimana peneliti mengumpulkan sejumlah data kemudian melakukan pengolahan data dengan teknik triangulasi dalam menentukan validitas dari data-data tersebut. Klasifikasi data akan dijelaskan secara spesifik pada bagian pembahasan dengan menggunakan kerangka analisis teori dependensi modern.

Teori dependensi atau ketergantungan modern diperkenalkan oleh Fernando Henrique Cardoso di tahun 1979, merupakan teori yang berawal dari teori imperialisme yang sebelumnya dikemukakan oleh Lenin. Pada teori dependensi modern, Cardoso berpendapat bahwa imperialisme masih terjadi, namun yang membedakannya dengan

imperialisme klasik adalah adanya perubahan bentuk imperialisme itu sendiri.

Pemikiran Cardoso ini berangkat dari negara-negara Amerika Latin yang mengalami kemiskinan dan keterbelakangan walaupun telah merdeka. Cardoso menjelaskan bahwa perubahan bentuk imperialisme tersebut adalah hadirnya dominasi dari negara maju kepada negara berkembang. Dominasi dapat terjadi ketika negara berkembang berperan sebagai penyedia, sementara negara maju berperan sebagai penyuplai impor (Cardoso, 1979).

Teori dependensi modern dijelaskan oleh Cardoso berbeda dengan teori ketergantungan klasik, dimana Cardoso melihat bahwa dalam konteks ketergantungan tersebut tidak selamanya menandakan keterbelakangan dan kemiskinan. Cardoso berpendapat bahwa ketergantungan dapat berjalan selaras dengan pembangunan. Perlu melihat ketergantungan bukan kepada situasi ketergantungan itu sendiri, melainkan lebih kepada sifat dan perkembangan yang terjadi dalam situasi ketergantungan. Dengan arti lain, selama pembangunan suatu negara dapat berjalan beriringan dengan situasi ketergantungan, maka ketergantungan tersebut tidaklah bersifat negatif (Candler, 1996).

Variabel dalam teori dependensi modern dapat dilihat dari tiga indikator sebagai berikut.

*Pertama*, secara historis struktural dimana pada variabel ini faktor sejarah dari hubungan negara maju dengan negara berkembang penting untuk ditelusuri sebagai tujuan untuk dapat mengetahui asal muasal kedua negara ini dapat berhubungan. Jika hubungan kedua negara ini berawal dari perjalanan imperialisme yang lama, maka besar kemungkinan situasi ketergantungan

akan terjadi meskipun negara yang terjajah sebelumnya telah merdeka.

*Kedua*, hubungan sebab-akibat antara negara maju dengan negara berkembang, dimana dalam hal ini teori dependensi modern menilai bahwa ketika situasi ketergantungan dapat berjalan selaras dengan pembangunan, maka hubungan dinamis atau keeratan antara negara maju dan negara berkembang akan pula dapat tercipta.

*Ketiga*, adanya faktor internal dan eksternal dimana situasi ketergantungan dapat dilihat dari faktor internal berupa perkembangan pembangunan yang tengah terjadi di negara berkembang hingga respon dan partisipasi baik secara positif atau negatif masyarakat terhadap pembangunan. Sedangkan, faktor eksternal dapat dilihat dari adanya dominasi negara maju terhadap negara berkembang melalui pembentukan aliansi, kontribusi terhadap negara berkembang serta sentimen masyarakat internasional (Cardoso, 1977).

## **PEMBAHASAN**

### **Ketergantungan Ketahanan Militer Indonesia Terhadap Amerika Serikat Pasca Embargo Militer**

Pencabutan embargo militer oleh Amerika Serikat kepada Indonesia secara resmi dilakukan pada tahun 2005 melalui penandatanganan Undang-Undang Apropriasi HR 3067 oleh Presiden George Walker Bush. Keputusan pencabutan embargo militer ini menjadikan kesempatan baru bagi Indonesia dalam meningkatkan kemampuan ketahanan militer yang dimiliki terutama dalam hal pengadaan suku cadang peralatan dan senjata utama militer serta menjadi babak baru bagi kerjasama militer antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang sebelumnya diembargo.



Bersamaan dengan berakhirnya embargo, maka hubungan militer Indonesia dengan Amerika Serikat juga turut dipulihkan, dimana alutsista dan barang-barang yang sebelumnya tertahan di Amerika Serikat telah mendapatkan kemudahan untuk dikirimkan ke Indonesia. TNI AU juga telah memperoleh ijin kembali dalam kontrak pengadaan suku cadang alutsista *Government to Government* melalui *Foreign Military Sales* (FMS) paska diterbitkannya *Letter of Offer and Acceptance* yang baru. Hal yang sama berlangsung pula bantuan pendidikan militer melalui program *International Military Education Training* (IMET) (Probosari, 2012).

Pada tahun 2006, hubungan militer antara Indonesia dengan Amerika Serikat ditandai dengan pengembalian serta modernisasi satu unit pesawat tempur F-5 Tiger bagi TNI AU yang sebelumnya sempat tertahan di Amerika Serikat. Kemudian, Amerika Serikat juga turut memberikan sejumlah 16 unit radar tempur varian AN/APG untuk 16 pesawat Hawk 209 milik TNI AU di tahun 2007. Hubungan militer kedua negara ini juga menjadi semakin membaik pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konteks pengadaan alutsista.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan Amerika Serikat pada tahun 2011 sepakat untuk mewujudkan kerjasama kemitraan komprehensif yang sebelumnya diusulkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008. Kerjasama kemitraan komprehensif ini merupakan komitmen kerjasama dalam jangka panjang dalam bidang politik dan keamanan. Pada bidang militer, kerjasama ini diwujudkan dengan penjualan sejumlah 27 unit helikopter angkut varian Bell-412EP dari Amerika Serikat kepada Indonesia di tahun 2012 (Probosari, 2012).

Pencabutan embargo militer serta normalisasi hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam konteks keamanan nasional secara langsung menjadikan Amerika Serikat sebagai negara penyedia (eksportir) penting bagi Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui data negara asal impor senjata ke Indonesia. Pada tahun 2021 Amerika Serikat menjadi negara pengekspor senjata terbesar kedua setelah Korea Selatan.

Pasca pencabutan embargo militer, Amerika Serikat telah menjual baik senjata maupun kendaraan tempur kepada Indonesia. tidak hanya menjual, Amerika Serikat telah menghibahkan beberapa alutsista yang diperlukan Indonesia seperti di antaranya sejumlah 24 unit F-16 C yang kemudian diperbaharui menjadi varian Block 32 untuk dapat melengkapi pesawat tempur veteran yang telah dimiliki Indonesia saat. Berikut data alutsista baik jenis senjata dan kendaraan tempur Indonesia yang berasal dari Amerika Serikat (Lihat Gambar 1, dan Tabel 1).

Kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat juga diwujudkan dengan tujuan untuk penanganan masalah terorisme melalui *Indonesian-United State Security Dialogue* (IUSSD) pada tahun 2006. Kerjasama melalui IUSSD ini diharapkan dapat menjadi kerjasama pertahanan dan keamanan kedua negara dengan diaplikasikannya program seperti dialog antar pemerintah, latihan militer bersama, dan bantuan militer. Adanya IUSSD dapat menjadi jalan bagi Amerika Serikat untuk memberikan pengaruh dalam peningkatan kapabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berikut pembahasan dalam IUSSD antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

*Pertama*, IUSSD yang dilakukan oleh Indonesia dan Amerika Serikat merupakan

Gambar 1  
Data Negara Asal Impor Senjata Ke Indonesia



Sumber: SIPRI, 2021 (dalam DataIndonesia.id, 2022)

suatu langkah kedua bagi kedua negara dalam upaya untuk melanjutkan kembali kerjasama yang sempat terhenti akibat konflik di Timor Timur dan embargo militer. Melalui dialog ini diharapkan dapat membangun komunikasi dua arah antara institusi militer dan pertahanan kedua negara, menciptakan sarana bagi pemerintah kedua negara untuk dapat saling bertukar pandangan dalam lingkup yang luas berkaitan dengan strategi keamanan, nasional, dan pertahanan. Melalui dialog ini telah mampu menciptakan pemahaman yang lebih dalam mengenai persepsi dan konsepsi akan strategi keamanan nasional kedua negara, serta menghasilkan saran yang positif dan sebagai bahan bagi pemerintah masing-masing negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri.

*Kedua*, Program latihan militer bersama antara kedua negara merupakan salah satu dari realisasi dialog IUSDD. Program latihan

militer bersama ini bertujuan untuk dapat membantu meningkatkan kemampuan teknis, kesiapan, kerjasama tim, dan kesiapan bantuan bencana alam bagi anggota TNI.

*Ketiga*, bantuan militer oleh Amerika Serikat merupakan bentuk realisasi yang diberikan kepada militer Indonesia. Bantuan militer tersebut berupa dana bantuan melalui program IMET dan FMF yang dapat digunakan untuk mendukung proses pendidikan anggota TNI dan pembelian alutsista militer. Meskipun sebelumnya bantuan militer pernah dihentikan akibat adanya embargo militer, tetapi sejak dicabutnya embargo maka secara otomatis bantuan militer beserta program-program bantuan lainnya dipulihkan kembali oleh Amerika Serikat.

*Keempat*, kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui IUSDD yang dilakukan pasca diberhentikannya embargo

Tabel 1  
Daftar Alutsista TNI Yang Berasal Dari Amerika Serikat

No.	Jenis	Varian	Jumlah
1.	Senjata	CT7 Turboprop	76
		HELTRAS ASW sonar	-
		F414 Turbofan	-
		ISC Diesel engine	4
		AAQ-33 Sniper Aircraft EO System	12
		MTU-493 Diesel engine	8
		OM-366 Diesel engine	6
		Frankenthal/Type-332 MCM ship	-
		C-13 Diesel engine	-
		F404 Turbofan	-
		AIM-120C AMRAAM BVRAAM	200
		MPQ-64 Sentinel (air search radar)	2
		Armed Bell-412	5
		Scan Eagle UAV	3
		ISC Diesel engine	5
		Armed Bell-505 Jet Ranger X	2
		Gattling Gun dan peluru	-
FGM-148 Javelin	25		
2.	Kendaraan	C-130J Hercules: KC-130B (1), C-130B (23), C-130J-30 (1)	25
		Tank ringan M3A1	1
		V-150 APC Twin-Light Machine Gun Turret, V-150 APC Parapet and Pintle Mounted Machine Gun, V-150 FSV 90mm MECAR Gun, dan V-150 Reconnaissance Twin-Machine Gun Turret	58
		Commando Scout Twin-Machine Gun Turret dan Commando Scout Observation Turret	28
		Artileri M109A4-BE	36
		Artileri M2A2	180
		M108 VBCL	4
		M113A1-B-Rec dan M113A1-B-MTC	-
		M35, M49, dan M60	500
		M715	-
		Boeing AH-64E Apache Guardian	8
		Bell 205A-1	10
		Hughes 300C	21
		F-16 Fighting Falcon	33
		F-15E Strike Eagle	36
		Boeing 737-2X9	3
		Cessna 182 Skylane	2
Cessna 172 Skyhawk SP	3		
Cessna T-41D Mescalero	15		

Sumber: Olahan Peneliti, 2023.

militer, merupakan upaya bagi kedua negara dalam bertukar wawasan dan informasi berkaitan dengan masalah keamanan dan pertahanan serta menjadi pertimbangan dalam menentukan arah politik selanjutnya. Dialog ini dilakukan secara rutin setahun sekali dengan lokasi dan waktu yang bergantian antara kedua negara.

*Kelima*, upaya dalam meningkatkan kapabilitas TNI, melalui IUSSD ini merupakan salah satu sarana pemulihan hubungan militer yang telah terjalin dengan Amerika Serikat. Dalam konteks keamanan, beberapa program kerjasama kedua negara direalisasikan melalui program latihan militer bersama dan bantuan militer digunakan oleh Indonesia untuk



mendukung peningkatan kemampuan TNI pada umumnya.

Bagi Amerika Serikat, Indonesia merupakan negara yang berperan penting sebagai penghubung jaringan keamanan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itulah Amerika Serikat tidak segan untuk memberikan bantuan baik berupa dana, peralatan, dan persenjataan yang dapat mendukung kapabilitas angkatan bersenjata Indonesia. Melalui bantuan dana militer Amerika Serikat memberikan dana kepada Indonesia sebesar \$1.547 juta pada tahun 2009, kemudian disusul pada tahun 2010 \$1.75 juta, \$1.8 juta di tahun 2011, dan \$2.7 juta di tahun 2012.

Di sisi lain, Amerika Serikat juga turut memberikan program pelatihan bagi anggota TNI yakni *The Global Peace Operations Initiative* (GPOI) atau juga dikenal dengan *Garuda Shield*, *Combating Terrorism Fellowship Program* (CTFP), *Joint Combined Exchange Training* (JCET), dan *Cooperation Afloat Readiness and Training* (CARAT) (Probosari, 2012). Sebagai negara yang masih belum mampu sepenuhnya untuk menyediakan alutsista bagi TNI secara mandiri, maka upaya untuk mengandalkan bantuan Amerika Serikat merupakan hal yang tidak terelakkan bagi Indonesia.

Hal inilah yang menimbulkan situasi ketergantungan positif antara Indonesia kepada Amerika Serikat pasca dicabutnya embargo militer di tahun 2005. Seperti yang telah dijelaskan serta data yang dijabarkan sebelumnya, dapat dilihat seberapa besar bantuan militer dan pengaruh yang diberikan oleh Amerika Serikat dalam mendukung peningkatan kapabilitas TNI. Adanya situasi ketergantungan melalui kemitraan dan bantuan militer oleh Amerika Serikat menjadi arti penting bagi Indonesia dalam memajukan

pertahanan yang kuat dan profesional tidak hanya untuk kepentingan Indonesia semata, tetapi turut pula bagi kepentingan di kawasan Asia Tenggara.

### **Ketergantungan Ketahanan Militer Indonesia Terhadap Amerika Serikat Melalui Pendekatan Teori Dependensi Modern**

Penguatan ketahanan militer telah menciptakan peluang bagi banyak negara. Melalui hubungan atau kemitraan yang terjalin antar negara dapat menjadikan negara penerima bantuan akan dapat memanfaatkan komponen teknologi dan pengetahuan teknis agar dapat menghasilkan sistem ketahanan militer yang canggih di negaranya. Hal ini kemudian yang turut pula menumbuhkan kemampuan pertahanan di negara berkembang, dikarenakan adanya situasi ketergantungan yang sebelumnya telah terjadi (Kurc, 2017). Konteks pemenuhan ketahanan alutsista di suatu negara, khususnya di sebagian negara kecil dan berkembang seringkali lebih memilih untuk berada dalam situasi ketergantungan dengan cara mendapatkan bantuan dari negara maju dengan tujuan agar dapat mendukung keberhasilan peningkatan ketahanan militer.

Faktor penyebabnya antara lain kurangnya kemampuan dan kuantitas sumber daya manusia yang terampil, kapabilitas dan infrastruktur, serta teknologi industri pertahanan yang masih kurang memadai dalam menunjang produksi ketahanan militer menyebabkan pilihan kemandirian industri pertahanan belum mampu diwujudkan. Seperti contoh adalah Israel, Brazil, dan Afrika Selatan yang menerima kondisi pertahanan mereka untuk terus bergantung kepada negara lain dikarenakan sumber daya yang sangat terbatas (Bitzinger, 2003).

Ketidakefisienan dan perlunya investasi besar terhadap pemenuhan ketahanan militer dalam upaya meningkatkan kemampuan yang ada menjadi kendala bagi negara-negara yang mencoba untuk mandiri sepenuhnya, karena itulah situasi ketergantungan muncul sebagai alternatif dalam menguraikan permasalahan ketahanan militer negara (Bitzinger, 2011). Sebagaimana pula pilihan Indonesia untuk bergantung terhadap Amerika Serikat dalam penguatan ketahanan alutsistanya yang secara spesifik akan dijelaskan melalui sudut pandang dependensi modern.

### **Terciptanya Hubungan Dinamis Antara Indonesia Dan Amerika Serikat**

Sejarah hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat ditandai dengan berubahnya kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia. Pada saat berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat merubah haluan kebijakan luar negerinya dengan memberikan dukungan akan kemerdekaan Indonesia. Dukungan tersebut ditujukan oleh Amerika Serikat agar dapat membendung pengaruh komunisme di Indonesia serta dengan harapan agar Indonesia dapat menjadi pos kekuatan baru yang dapat diandalkan dalam upaya meredam pengaruh ideologi komunis di kawasan Asia Tenggara.

Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949, hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat pun terjalin. Hubungan ini ditandai dengan kesediaan Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi melalui program *Economic Cooperation Administration* (ECA) serta sejumlah 10.000 bantuan persenjataan bagi polisi Indonesia. Amerika Serikat telah menjadi negara pemberi bantuan terbanyak

bagi Indonesia pasca kemerdekaan, sejumlah dana \$395.2 juta telah diberikan oleh Amerika Serikat dalam kurun waktu tahun 1950 hingga tahun 1959 (Ernestine van Oosten, 1963; Kahin dan Kahin, 1997; Gardner, 1999).

Kedekatan yang terjalin antara Indonesia dan Amerika Serikat tersebut kemudian menjadikan golongan kiri mengkritik Indonesia yang tidak sesuai dengan prinsip kebijakan luar negeri bebas-aktif. Hal ini menjadikan posisi sulit bagi Indonesia, di satu sisi Indonesia membutuhkan bantuan ekonomi untuk pemulihan pasca kemerdekaan, namun di sisi lain adanya tuntutan bagi Indonesia untuk bersikap netral. Dalam upaya menjaga netralitas tersebut, Indonesia kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan perdagangan dengan Cina.

Keputusan ini ditentang oleh Amerika Serikat yang kemudian berdampak pada dikurangnya bantuan untuk Indonesia. Untuk dapat memperoleh bantuan dari Amerika Serikat kembali, Indonesia melalui Moh. Hatta melakukan perjanjian rahasia dengan Duta Besar AS Merle H. Cochran yang dikenal dengan *Military Security Assistance* (MAS) atau *Cochran Affair* sebagai salah satu upaya dalam membendung pengaruh komunis (Kivimaki, 2003; Poesponegoro dan Notosusanto, 2008). Melalui perjanjian ini Amerika Serikat memberikan bantuan militer (peralatan tempur) senilai \$7.3 juta pada tahun 1958, disusul kemudian di tahun 1959 dan 1960 bantuan tersebut meningkat menjadi \$22 juta, tetapi di tahun 1965 dan 1966 bantuan tersebut dihentikan akibat memanasnya hubungan Amerika Serikat dengan Presiden Soekarno.

Memanasnya hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat diakibatkan keputusan Indonesia memilih condong ke Uni Soviet

sehingga menimbulkan kekecewaan bagi Amerika Serikat, puncak kekecewaan tersebut adalah keputusan secara sepihak yang diambil oleh Presiden Soekarno untuk merangkul komunisme dan mengumumkan kebijakan Poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang. Kondisi ini kemudian mendorong Amerika Serikat untuk melakukan pendekatan rahasia kepada TNI AD dengan tujuan untuk dapat meng kudeta Presiden Soekarno.

Upaya ini menjadikan TNI AD mendapatkan bantuan militer berupa dana sejumlah \$13 juta di tahun 1964 dan peralatan logistik tempur, sistem komunikasi, dan peralatan tempur dari Amerika Serikat melalui program IMET (Kivimaki, 2003). Kesungguhan upaya Amerika Serikat untuk mempersempit pengaruh Uni Soviet di Indonesia terlihat dari keputusan untuk memberikan bantuan militer kepada TNI sebesar \$93 juta. Bantuan militer ini diberikan tidak terlepas dari kekhawatiran Amerika Serikat yang semakin meningkat. Hingga yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat melalui CIA mengerahkan *undercover operation* (operasi terselubung) yang dilakukan untuk mendukung aksi anti komunis oleh Perdana Menteri PRRI Syafruddin Prawiranegara dan Permesta. Aksi pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI dan Permesta ini ditujukan untuk dapat menjatuhkan pemerintahan Soekarno yang dinilai pro-komunisme.

Kesamaan tujuan antara Amerika Serikat dengan PRRI dan Permesta dalam membendung pengaruh komunisme di Indonesia ini pula yang turut menjadikan Amerika Serikat memberikan bantuan militer sebesar \$500.000 serta persenjataan berupa senjata api dan mesin lengkap dengan amunisi dan granat, alat perang berat (meriam artileri, truk-truk pengangkut pasukan, pesawat

tempur, dan jeep). Seluruh persenjataan dan kendaraan perang tersebut dipinjamkan oleh Amerika Serikat agar PRRI dapat memiliki angkatan udaranya sendiri yang dinamakan AU Revolusioner (AUREV). Namun, upaya ini mengalami kegagalan dikarenakan tidak adanya dukungan oleh TNI sebagai angkatan bersenjata resmi Indonesia (Kahin dan Kahin, 1997; Gardner, 1999; Bradley dan Lubis, 1991).

Upaya Amerika Serikat untuk dapat meng kudeta Presiden Soekarno tidaklah terhenti. Amerika Serikat memerintahkan CIA dan Pentagon untuk melancarkan operasi rahasia yang dikenal dengan operasi rahasia *black ops*. Adanya operasi rahasia ini memiliki tujuan utama yakni untuk menggulingkan Soekarno sebagai presiden resmi Indonesia melalui kudeta militer yang dilancarkan pada September 1965 atau dikenal sebagai Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI). Bantuan dana diberikan oleh Amerika Serikat sebesar \$1.1 juta kepada para petinggi militer TNIAD agar dapat melakukan eksekusi berdarah terhadap G30S/PKI (Kivimaki, 2003; Tribunal1965, 2016).

Peristiwa September 1965 tersebut menampilkan Letjend TNI Soeharto sebagai penglima penumpas G30S/PKI yang selanjutnya Soeharto dilantik oleh MPR sebagai presiden menggantikan Soekarno. Hubungan militer antara Indonesia dan Amerika Serikat kemudian memulai babak baru dalam konteks keamanan nasional. Pada awal kepemimpinan Soeharto, Indonesia mendapatkan bantuan militer berupa peralatan maupun digunakan sebagai biaya perawatan alutsista dan pelatihan anggota militer sebesar \$18 juta di tahun 1971. Bantuan tersebut meningkat di tahun 1972 sebesar \$25 juta dan \$29.9 juta di tahun 1973 (Pauker, 1973).

Situasi ketergantungan ketahanan militer Indonesia terhadap Amerika Serikat kemudian semakin menguat ditandai dengan adanya Operasi Seroja yang dilakukan di era pemerintahan Presiden Soeharto. Operasi Seroja pada hakikatnya merupakan dampak dari interaksi politik yang terjadi antara negara-negara anti komunis. Salah satu negara tersebut tidak lain adalah Amerika Serikat sebagai penganut demokrasi liberal. Operasi Seroja merupakan operasi militer yang didorong oleh situasi politik internasional yang kemudian merembet ke wilayah Timor Timur.

Indonesia sebagai negara yang secara wilayah dekat dengan Timor Timur serta negara yang mendukung anti komunisme berupaya untuk ikut menyelesaikan permasalahan. Selain bertujuan untuk menekan ideologi komunisme, Operasi Seroja sejatinya merupakan kepentingan bagi Amerika Serikat karena wilayah Timor Timur merupakan wilayah strategis bagi angkatan laut Amerika Serikat sebagai pangkalan kapal perangnya terutama kapal selamnya untuk menunjang mobilitas strategis (*strategic mobility*) antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Mobilitas tersebut menjadi penting bagi Amerika Serikat karena pada saat bersamaan PBB sedang membahas rancangan undang-undang kelautan, dimana rancangan ini memungkinkan PBB untuk meniadakan hak melintasi bawah laut.

Hal ini kemudian menjadikan hubungan bilateral dengan militer Indonesia terjalin agar hak perlintasan bawah laut dapat berlangsung (Taylor, 1998). Amerika Serikat kemudian mengizinkan Operasi Seroja dilakukan oleh Indonesia. Sehari sebelum operasi penyerangan ke Dili dilakukan, Presiden Ford berkunjung ke Indonesia untuk menemui

Presiden Soeharto. Kedatangan Presiden Ford ini adalah untuk memberikan izin atas rencana Presiden Soeharto, yakni Operasi Seroja.

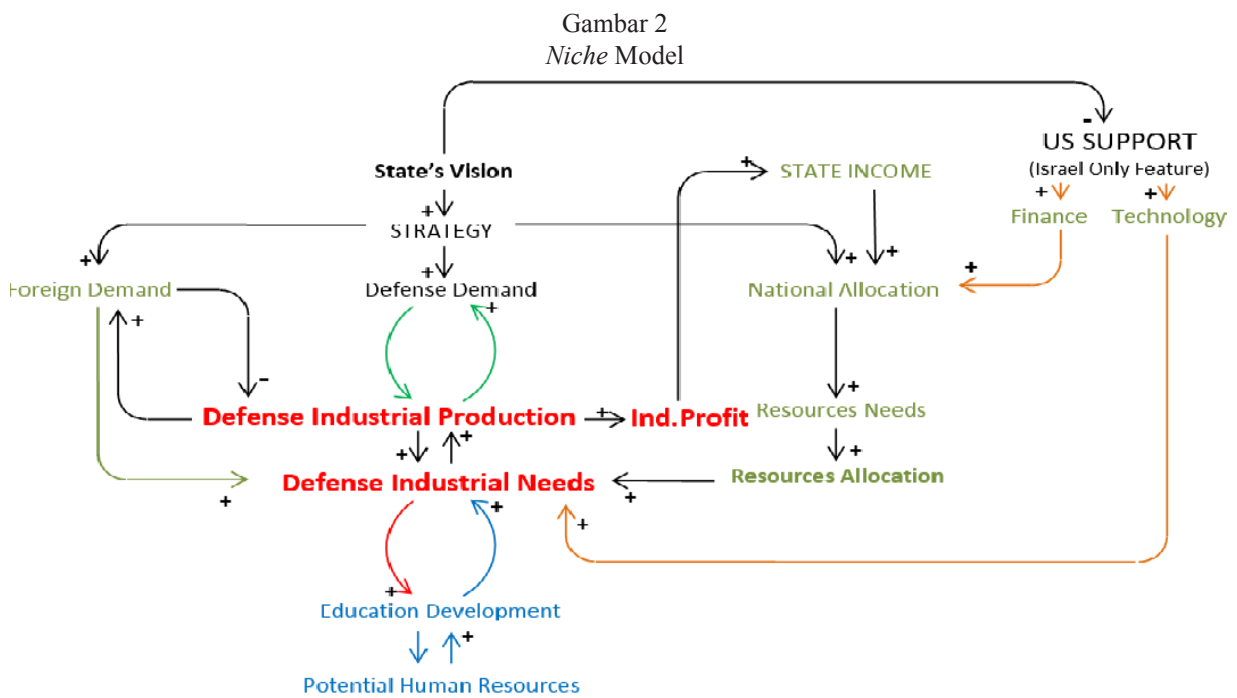
Dalam melancarkan dan memudahkan kepentingan tersebut, Amerika Serikat kemudian memberikan bantuan militer kepada Indonesia baik dalam bentuk pelatihan, persenjataan, helikopter, dan pesawat tempur. Bantuan militer tersebut mengalir dari era pemerintahan Presiden Ford hingga Presiden Carter, terutama dalam hal penjualan senjata dan peralatan militer (Hadi, 2007). Amerika Serikat telah memasok 90 persen dari total persenjataan yang diperlukan oleh militer Indonesia dalam operasi ini. Melalui bantuan militer sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto telah menjadikan Amerika Serikat memiliki pengaruh yang besar kepada Indonesia terutama dalam hal urusan keamanan dan militer internasional. Hal ini yang kemudian melahirkan situasi ketergantungan Indonesia terhadap Amerika Serikat terkait peralatan militer (Nevins, 2008).

Faktor historis struktural mengenai hubungan antar negara, dalam hal ini hubungan militer antara Indonesia dengan Amerika Serikat penting untuk ditelusuri asal muasal kedua negara dapat berhubungan. Faktor sejarah ini secara langsung akan dapat memperlihatkan bagaimana hubungan antara satu negara dengan negara yang lain dapat menimbulkan situasi ketergantungan. Dalam hal ini teori dependensi modern menjelaskan jika hubungan kedua negara berawal dari imperialisme yang dilakukan pada waktu yang lama maka akan besar kemungkinan situasi ketergantungan dapat muncul meskipun negara yang sebelumnya terjajah telah merdeka. Proses sejarah antara Indonesia dan Amerika Serikat telah melahirkan situasi ketergantungan dalam konteks militer.

Situasi ketergantungan ini pula yang turut menjadikan Indonesia tidak dapat lepas sepenuhnya dari Amerika Serikat meskipun telah mengalami embargo militer di tahun 1999. Terjadinya situasi ketergantungan yang terjadi hingga pasca pencabutan embargo militer di tahun 2005 pada perkembangannya justru memperbesar terciptanya hubungan dinamis antara kedua negara tersebut. Hubungan dinamis tersebut menjadi salah satu indikator bagaimana situasi ketergantungan antara negara berkembang kepada negara maju dapat dikatakan sebagai dependensi positif. Argumen utama dalam dependensi modern menjelaskan bahwa situasi ketergantungan dapat berjalan selaras dengan pembangunan. Dalam hal ini dependensi modern melihat konteks ketergantungan bukan kepada situasi antara negara berkembang dengan negara maju, tetapi lebih kepada hasil dari proses perkembangan yang tercipta diantara kedua negara.

Hubungan dinamis yang tercipta antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui situasi ketergantungan yang terjadi dapat dilihat melalui pola *niche* model atau model industrial *niche*. *Niche* model merupakan pola pengembangan industri pertahanan yang diadopsi oleh Indonesia. Pada model ini memfokuskan kepada pembangunan teknologi pertahanan melalui komparasi keunggulan teknologi dengan negara lain (Muhammad, 2014). Industri pertahanan Indonesia saat ini dibentuk untuk mengikuti *niche* model yang digambarkan melalui Gambar 2.

*Niche* model merupakan model industri yang digunakan oleh sebagian negara berkembang yang belum mampu sepenuhnya dalam mencukupi kebutuhan alutsista dalam negerinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bitzinger bahwa beberapa negara seperti Israel, Brazil, Afrika Selatan, juga Indonesia bahwa keterbatasan akan sumber daya dan



**ISRAELI Military Industrial Complex Model**  
*Modeling System Thinking by Ir. Ade Muhammad, M.Han*

Sumber: Muhammad, 2014



infrastruktur akan menjadikan pertahanan negara-negara tersebut mengadopsi sistem *niche* model. Pada kasus Indonesia, *niche* model yang diadopsi diperkuat dengan situasi ketergantungan akibat proses historis struktural antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam konteks penguatan ketahanan alutsista yang terjadi sejak Perang Dingin.

Meskipun keterlibatan Amerika Serikat kedalam dinamika militer Indonesia diwarnai banyak unsur politis serta terjadinya embargo militer di tengah hubungan kedua negara tersebut nyatanya tidak menjadikan Indonesia mampu sepenuhnya untuk merubah sistem industri pertahanannya menjadi *autarki* (mandiri). Upaya penguatan ketahanan militer Indonesia dapat terpenuhi serta memperlihatkan bagaimana situasi ketergantungan dapat menciptakan hubungan dinamis antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui *niche* model.

*Niche* model menggambarkan bahwa produksi alutsista industri pertahanan suatu negara akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan alutsista dalam negerinya. Namun, adanya keterbatasan yang dialami oleh negara baik terkait sumber daya alam, manusia, teknologi, dan infrastruktur merupakan kendala dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karenanya, kehadiran negara maju dalam hal ini Amerika Serikat baik dalam bentuk bantuan dana dan teknologi akan dapat memberi dukungan kepada negara berkembang.

Mendasarkan pada visualisasi *niche* model di atas, maka dapat dijelaskan bahwa peningkatan hasil produksi dalam negeri dapat dicapai jika ada negara maju sebagai sumber pendukung. Dalam hal ini pemerintah negara berkembang bukanlah menjadi satu-satunya sumber utama, tetapi terdapat sumber

lain sebagai pendukung. Peningkatan hasil produksi pertahanan akan turut pula dalam meningkatkan aspek sumber daya yang dibutuhkan dalam menunjang ketahanan nasional hingga kemudian proses ini akan berujung pada titik pusat yakni peningkatan pendapatan nasional (Muhammad, 2014).

### **Peningkatan Efisiensi Produktivitas**

Telah terdapat penelitian yang menganalisis mengenai keterkaitan antara situasi ketergantungan melalui impor senjata maupun transfer teknologi militer dengan pertumbuhan ekonomi dalam konteks peningkatan efisiensi produktivitas dalam negeri negara berkembang. Pada penelitian ini, peningkatan efisiensi produktivitas akan dijelaskan menggunakan analisis *Malmquist productivity index* yang dikemukakan oleh Yi-Chung Hsu dan Chien-Chiang Lee. Hsu dan Lee menjelaskan mengenai *Malmquist productivity index* dengan cara menganalisis cakupan negara yang lebih luas (sebanyak 67 negara termasuk Indonesia) dalam 3 kelompok tingkat pendapatan negara yang berbeda untuk dapat menarik korelasi antara faktor eksternal dari teknologi militer dengan perubahan produktivitas (Hsu dan Lee, 2012).

*Malmquist productivity index* dapat digunakan dalam mengukur apakah situasi ketergantungan pada konteks impor senjata sebagai faktor yang memiliki dampak terukur terhadap produktivitas dan efisiensi negara. Berdasarkan analisis tingkat pendapatan negara, menunjukkan bahwa negara dengan tingkat pendapatan yang menengah dan rendah memiliki perubahan efisiensi yang lebih tinggi serta efisiensi ini berkontribusi terhadap perubahan produktivitas negara jika dibandingkan dengan negara berpenghasilan tinggi. Dalam hal ini Hsu dan Lee menjelaskan

bahwa dampak dari impor senjata yang terjadi pada negara-negara berkembang akan mempengaruhi efisiensi produksi dalam negeri, efisiensi ini akan secara langsung berdampak kepada tingkat pertumbuhan ekonomi nasional (Hsu dan Lee, 2012).

Hsu dan Lee membagi 2 kategori secara spesifik mengenai dampak impor senjata terhadap efisiensi produktivitas.

*Pertama*, angka produktivitas akan meningkat seiring dengan impor senjata yang dilakukan oleh negara. Produksi senjata mandiri membutuhkan biaya dan modal investasi yang lebih besar, karenanya impor senjata justru memberikan hasil positif terhadap peningkatan produktivitas teknis dan ekonomi dalam negeri. Hal ini juga diperkuat oleh studi yang dilakukan Hartley bahwa peningkatan efisiensi militer akan

meningkatkan pula keuntungan bagi angkatan bersenjata (TNI) (Hartley, 2003).

*Kedua*, berkaitan dengan perubahan efisiensi produktivitas bahwa adanya difusi teknologi militer akan berdampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Hasil angka perubahan efisiensi yang lebih tinggi di negara dengan pendapatan sedang dan rendah dalam persentase menunjukkan perubahan efisiensi sebesar 91%, hal tersebut menandakan bahwa perubahan efisiensi bersifat positif. Sementara itu, hasil skala perubahan efisiensi tersebut juga menunjukkan bahwa keuntungan lebih tinggi dapat diperoleh melalui impor senjata. Impor senjata dalam hal ini memberikan pengaruh signifikan terhadap teknologi dan produksi negara penerima (Hsu dan Lee, 2012).

Pada kasus Indonesia (termasuk ke dalam kategori negara penghasilan rendah),

Gambar 3  
Malmquist Productivity Index Berdasarkan Tingkat Pendapatan Negara

Income level	Country	EFFCH	TECHCH	PECH	SECH	TFPCH
High-income (20 countries)	Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Greece, Hong Kong, Iceland, Israel, Italy, Korea (South), Kuwait, Netherlands, Norway, Portugal, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Sweden, UK	0.978	0.999	1.023	0.985	0.976
Middle-income (13 countries)	Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican, Jamaica, Malaysia, Mexico, South Africa, Turkey, Uruguay, and Venezuela	1.058	0.987	1.074	0.998	1.044
Low-income (24 countries)#	Bolivia, Cameroon, China, Cote d'Ivoire, Ecuador, Egypt, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordan, Kenya, Morocco, Niger, Nigeria, Pakistan, the Philippines, Senegal, Sri Lanka, Swaziland, Thailand, Togo, Tunisia, and Zimbabwe	0.995	1.003	0.950	1.074	0.993

Sumber: Hsu dan Lee, 2012.

maka impor alutsista turut berkontribusi pada efisiensi produktivitas dalam negeri dimana terbukti pada hasil pengukuran Malmquist yang memperlihatkan perubahan sebesar 0.995 *efficiency change* (EFFCH), kemudian perubahan sebesar 1.003 *technical change* (TECHCH), sebesar 0.950 *pure efficiency change* (PECH) dan 1.074 *scale efficiency change* (SECH), serta sebesar 0.993 *total factor productivity change* (TFPCH) (Lihat Gambar 3).

Pengukuran skala efisiensi produktivitas dengan menggunakan *Malmquist productivity index* secara langsung dapat menjelaskan serta mendukung situasi ketergantungan militer melalui impor senjata dapat menghasilkan hasil yang positif mendasarkan terhadap keuntungan baik teknologi dan ekonomi yang diperoleh oleh negara penerima. Hal ini justru berkebalikan dengan argumen teori dependensi klasik yang lebih banyak menyatakan bahwa kesenjangan dan kemiskinan akan tercipta akibat adanya situasi ketergantungan.

Pada beberapa kasus, situasi ketergantungan antara Indonesia terhadap Amerika Serikat pasca embargo militer dalam konteks penguatan ketahanan militer memberikan hasil yang cukup signifikan terhadap efisiensi teknologi dan produktivitas militer Indonesia serta hal ini secara otomatis turut pula mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara.

## SIMPULAN

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

*Pertama*, ketergantungan positif Indonesia terhadap Amerika Serikat dalam penguatan ketahanan TNI pasca embargo militer tahun 2005 merupakan ketergantungan positif karena adanya 2 indikator dalam pencapaiannya.

(1). Terciptanya hubungan dinamis antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Proses historis struktural serta imperialisme dalam konteks militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia pada kurun waktu yang lama telah menjadikan situasi ketergantungan militer Indonesia terhadap Amerika Serikat.

Meskipun telah terjadi embargo militer di tahun 1999, nyatanya hal ini tidak dapat menjadikan Indonesia melepaskan ketergantungan sepenuhnya. Tetapi pada perkembangannya, situasi ketergantungan ini justru menciptakan hubungan yang bersifat dinamis bagi Indonesia dimana sistem pertahanan Indonesia yang kemudian mengadopsi *niche* model akibat situasi ketergantungan. Pengadopsian *niche* model yang secara spesifik telah dijelaskan pada bagian pembahasan sebelumnya pada faktanya akan secara langsung mempengaruhi peningkatan pendapatan nasional Indonesia.

(2). Ketergantungan Indonesia terhadap Amerika Serikat turut pula menghasilkan peningkatan efisiensi produktivitas. Impor alutsista maupun transfer teknologi militer berdampak kepada peningkatan efisiensi produktivitas menggunakan skala pengukuran *Malmquist productivity index* dimana hasil pengukuran tersebut memperlihatkan perubahan yang lebih tinggi pada aspek efisiensi, teknis, dan produktivitas. Perubahan efisiensi ini akan secara langsung mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional Indonesia.

*Kedua*, merujuk kepada teori dependensi modern, maka ketergantungan antara Indonesia kepada Amerika Serikat justru dapat memberikan hasil yang selaras bagi Indonesia dalam hal pertumbuhan ekonomi dan industri pertahanan. Ketergantungan tidak

selamanya hanya dipandang dari sisi negatif semata, tetapi melalui situasi ketergantungan juga dapat menghasilkan dampak positif bagi negara. Dengan arti lain, mendasarkan kepada argumen Cardoso bahwa ketergantungan tidak selamanya menandakan sebagai kemiskinan dan keterbelakangan. Ketergantungan dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo, 2004, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Bakrie, Connie R., 2007, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bitzinger, Richard A., 2003, *Towards a Brave New Arms Industry*, New York: Routledge.
- Bitzinger, Richard A., 2011, "China's Defense Technology and Industrial Base in a Regional Context: Arms Manufacturing in Asia", dalam *Journal Strategic Studies*. Vol. 34 No. 3, hh. 425-450.
- Bradley, William L dan Mochtar Lubis, 1991, *Dokumen-Dokumen Pilihan Tentang Politik Luar Negeri Amerika Serikat dan Asia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Candler, Gaylord George, 1996, *Cardoso, Dependency Theory and Brazil*, St. Louis: Indiana University.
- Cardoso, Fernando Henrique, 1977, "The Consumption of Dependency Theory in the US", dalam *Latin American Research Review*. Vol. 12 No. 3, hh. 25-92.
- Cardoso, Fernando Henrique, 1979, *Dependency and Development in Latin America*, California: University of California Press.
- DataIndonesia, 2022, *Daftar Negara Asal Impor Senjata Indonesia 2021*, Korsel Terbesar. Diakses di < <https://dataindonesia.id/ragam/detail/daftar-negara-asal-impor-senjata-indonesia-2021-korsel-terbesar>> pada Februari 2023.
- Ernestine van Oosten, Helene, 1963, "United States Policy and Response Towards Indonesian Non-Alignment 1952-1959", *Tesis*, California, University of Southern California.
- Gardner, Paul F, 1999, *50 Tahun Amerika Serikat-Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hadi, Syamsul, Andi Widjajanto, Rori Permadi U, Nurul Rochayati, 2007, *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal, dan Dinamika Internasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hartley, K, 2003, "The Future of European Defence Policy: an Economic Perspective ", dalam *Jurnal Defence and Peace Economics*. Vol. 14 No. 2, hh.107-115.
- Hsu, Yi-Chung dan Chien-Chiang Lee, 2012, "The Impact of Military Technology Transfer on Economic Growth: International Evidence", dalam *Jurnal Applied Economics*. Vol. 44 No. 19, hh. 2437-2449.
- Kahin, Audrey R. dan George McT. Kahin, 1997, *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia*, Jakarta: Grafiti.
- Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, 2015, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Jakarta.
- Kivimaki, Timo, 2003, *US-Indonesian Hegemonic Bargaining Strength of Weakness: US Foreign Policy and*

- Conflict in The Islamic World*, London: Ashgate.
- Kurc, Caglar, 2017, "Between Defence Autarky and Dependency: The Dynamics of Turkish Defence Industrialization", dalam *Defence Studies Journal*. Vol. 17 No. 3, hh. 260-281.
- Marwan, M dan Jimmy. P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.
- Muhaimin, Yahya A, 2008, *Bambu Runcing dan Mesiu: Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Muhammad, Ade, Sri Hartati, Kartib Bayu, dan Muhammad Tasrif, 2014, "Indonesian Defense Industry Model Concept: A Framework for Defense Industry Building", dalam *Journal of Advanced Management Science*. Vol 2. No. 4, hh. 260-266.
- Nevins, Joseph, 2008, *Pembantaian Timor Timur: Horor Masyarakat Internasional*, Yogyakarta: Galang Press.
- Pauker, 1973, *In Search of Self Reliance: US Security Assistance to the Third World Under the Nixon Doctrine*, California: Rand Corporation.
- Poesponegoro, Marwati Djoed dan Nugroho Notosusanto, 2008, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Probosari, Mayang, 2012, "Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat Bidang Pertahanan Keamanan Pasca Kemenangan Barack Obama Tahun 2009", *Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sugiyono 2013, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.
- Taylor, John G, 1998, *Perang Tersembunyi: Sejarah Timor Timur yang Dilupakan*, Jakarta: Fortilos.
- Tribunal1965, 2016, *CIA 'Black Operation' Indonesia*. Diakses di <<https://www.tribunal1965.org/en/cia-black-operation-indonesia/>> pada Februari 2023.
- Weldes, Jutta, 1996, "Constructing National Interest", dalam *European Journal of International Relations*. Vol. 2 No. 3, hh. 275-318.
- Wezeman, Siemon T, 2019, *Arms Flows to South East Asia*. Diakses di <<https://www.sipri.org/publications/2019/other-publications/arms-flows-south-east-asia>> pada Oktober 2022